

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## DINAS PERDAGANGAN



## DINAS PERDAGANGAN

Tahun 2024

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DINAS PERDAGANGAN merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-I pelaksanaan Rencana Strategis DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024 - 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024 - 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DINAS PERDAGANGAN. Kinerja DINAS PERDAGANGAN diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DINAS PERDAGANGAN pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 17 Februari 2025  
**Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANGKALAN**



**ACHMAD SIDDIK, S.A.P., MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700205 200312 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	3
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	31
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DINAS PERDAGANGAN selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut DINAS PERDAGANGAN diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERDAGANGAN Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perdagangan.

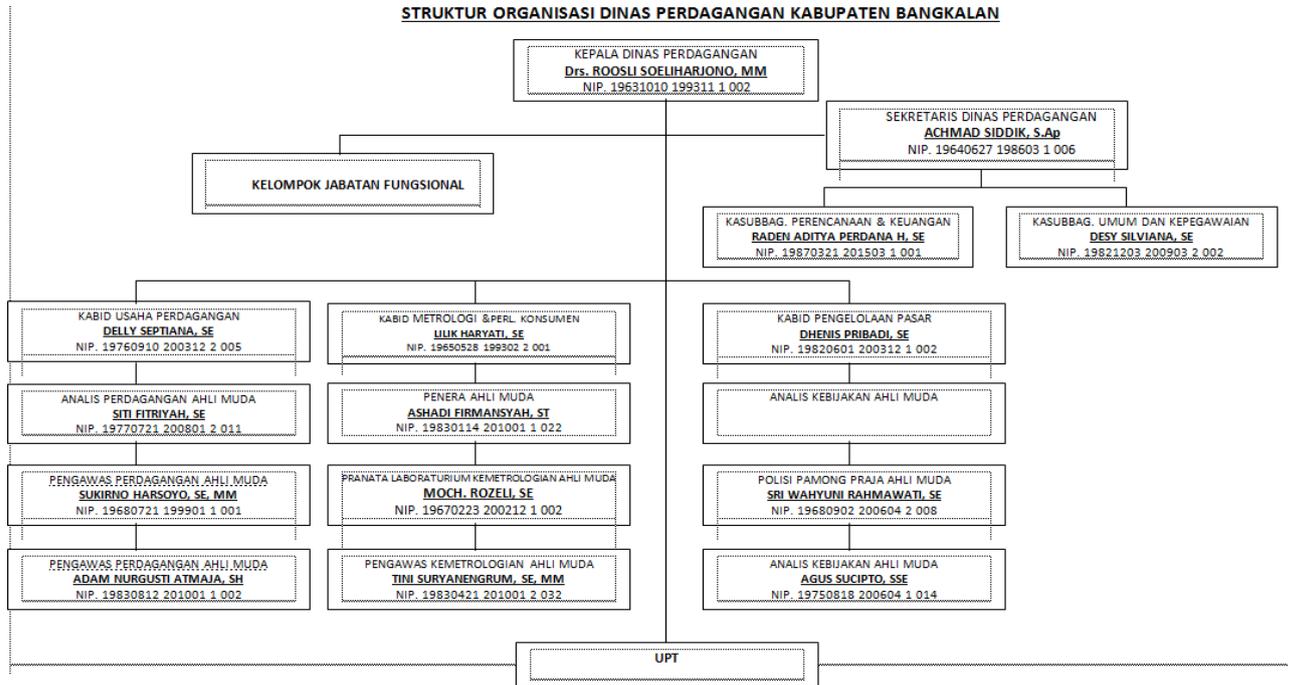
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai

B. pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/SubBidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan.

Gambar 1.1.



### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DINAS PERDAGANGAN periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang Perdagangan Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai Dinas Perdagangan

Kabupaten Bangkalan.

2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya produk unggulan untuk mengembangkan peran duniausaha dan investasi
3. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri
4. Pemberdayaan kepada eksportir, importer dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk.
5. Pameran yang wajib diikuti, seperti Inacraft, TEI dan Pekan Raya Jakarta pameran-pameran lainnya
6. Penataan toko modern
7. Peningkatan informasi perdagangan
8. Peningkatan pelayanan kemetrolagian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal
9. Penataan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.
10. Pemberdayaan Pedagang dengan penataan PKL didalam pasar.
11. Managemen pengelolaan pasar bagi para Kepala Pasar.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra DINAS PERDAGANGAN periode 2024-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang Perdagangan Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai Dinas Perdagangan.

2. Pemberdayaan kepada eksportir, importir dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk.
3. Peningkatan informasi perdagangan
4. Peningkatan pelayanan kemetrolagian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal
5. Penataan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.
6. Managemen pengelolaan pasar bagi para Kepala Pasar.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

5. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
6. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 47/E);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis DINAS PERDAGANGAN adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DINAS PERDAGANGAN. Rencana Strategis DINAS PERDAGANGAN yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DINAS PERDAGANGAN dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra DINAS PERDAGANGAN tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024 - 2026.

Penyusunan Renstra DINAS PERDAGANGAN telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2024 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DINAS PERDAGANGAN merupakan hasil kesepakatan bersama antara DINAS PERDAGANGAN dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra DINAS PERDAGANGAN tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja DINAS PERDAGANGAN dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah .

Visi Pemerintah Tahun 2018-2023 adalah:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG  
RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL“**

## 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Bangkalan sebagaimana dikemukakan diatas, Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan mengemban Misi ke 3 yaitu :

**“Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas Dan TataKelola Pemanfaatan Potensi Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”.**

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2024 - 2028 sebanyak satu tujuan dan dua sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DINAS PERDAGANGAN sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**DINAS PERDAGANGAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan melalui peningkatan pelayanan pasar tradisional dan peningkatan ekspor-impor daerah	1.1 Meningkatkan layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	55.17	58.62	62.07
		1.2 Meningkatkan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	85	86
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61	62	63

Sumber : Renstra DINAS PERDAGANGAN periode 2024 - 2026

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**DINAS PERDAGANGAN**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan Melalui Peningkatan Pelayanan Pasar Tradisional Dan Peningkatan Ekspor-Impor Daerah	1.1	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	Persentase	Untuk Mengetahui Pertumbuhan Pelaku Usaha yang Tersebar di Pasar-pasar yang Berada Di Kabupaten Bangkalan	$\frac{\text{Kondisi Tahun Sebelumnya} - \text{Target Tahun Ini}}{\text{Kondisi Tahun Sebelumnya}} \times 100$	Disdag
1	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	1.1	Persentase meningkatnya pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	Persentase	Untuk mengetahui Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	$\frac{\text{Target Pasar Rakyat yang Layak Fungsi}}{\text{Jumlah Pasar}} \times 100$	Disdag
2	Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	2.1	Indek kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah	Nilai	Untuk mengetahui Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pasar	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pasar	e-Sukma
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Untuk mengetahui Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian Tim Sakip Kabupaten Bangkalan	LHE Sakip Disdag

Sumber : Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024

## B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2024**  
**DINAS PERDAGANGAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan melalui peningkatan pelayanan pasar tradisional dan peningkatan ekspor-impor daerah	1.1 Meningkatkan layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	prosentase	55.17
		1.2 Meningkatkan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	61

Sumber : Rencana Kerja DINAS PERDAGANGAN tahun 2024

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan

karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada bulan November tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala DINAS PERDAGANGAN telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan Melalui Peningkatan Pelayanan Pasar Tradisional Dan Peningkatan Ekspor-Impor Daerah	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	1.03
1	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	55.17
2	Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61

*Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DINAS PERDAGANGAN:

Tabel 2.5

## Program dan Kegiatan DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>PERSENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN PASAR</b>	<b>6,9 %</b>
1	<b>Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana pasar yang dibangun</b>	<b>100 %</b>
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Sarana Distribusi Perdagangan	29 Unit
2	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Presentase Operasi Penertiban &amp; Pelaksanaan Pemutahiran Data Pedagang Di Pasar Yang Dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen
II	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>100 %</b>
1	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyuluhan Dan Pemberdayaan Konsumen Yang Dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan
2	<b>Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan</b>	<b>Jumlah Data Harga Sembako , Barang Penting</b>	<b>100 %</b>

	<b>Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Di Pasaran</b>	
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan
2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan
3	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>PERSENTASE PENGEMBANGAN EKSPOR YANG DILAKSANAKAN</b>	<b>100 %</b>
1	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase Pengembangan Ekspor Yang Dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>
1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan Dan Jasa Akomodasi	20 Pelaku Usaha
<b>IV</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>PERSENTASE PELAYANAN TERA / TERA ULANG ALAT UTTP DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>100 %</b>

1	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupatara, Tera Ulang, Dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	250 Unit
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE TERPENUHINYA LAYANAN KESEKRETARIATAN</b>	<b>100 %</b>
1	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Laporan
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan
2	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>
1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1 Paket
2	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	10 Laporan
3	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang</b>	<b>100 %</b>

		<b>Terlaksana</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit
2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	5 Unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit
<b>4</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil	1 Dokumen
3	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
4	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
<b>5</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>
1	Koordinasi Dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan

	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
2	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	12 Bulan
6	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Yang Tersusun</b>	<b>100 %</b>
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Yang Tersusun	2 Dokumen

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS PERDAGANGAN selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS PERDAGANGAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi DINAS PERDAGANGAN .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DINAS PERDAGANGAN dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama DINAS PERDAGANGAN.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, DINAS PERDAGANGAN juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DINAS PERDAGANGAN tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan Melalui Peningkatan Pelayanan Pasar Tradisional Dan Peningkatan Ekspor-Impor Daerah	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	1.03	1.03	100%	Sangat Tinggi	Disdag
1	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat Dan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	55.17	55.17	100%	Sangat Tinggi	Disdag
2	Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	87.12	104%	Sangat Tinggi	e-Sukma
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61	62	102%	Sangat Tinggi	LHE Sakip

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat Dan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	100
						55.17	55.17	100
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat				84	87.12	104
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah				61	62	102

Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan yaitu :

1. Pada sasaran strategis meningkatnya layanan daya saing sektor perdagangan menunjukkan pencapaian
  - Indikator persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi capaian di tahun 2024 tercapai dengan baik yaitu tercapai 100% sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu 2 pasar yang diperbaiki untuk tahun 2024 dari total 29 pasar yang ada di Kabupaten Bangkalan
2. Pada sasaran Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan menunjukkan pencapaian
  - Indikator pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai maksimal sebesar 104% dari target yang ditetapkan.
  - Indikator kedua Nilai SAKIP Perangkat Daerah juga tercapai dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 102%

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
I	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan Melalui Peningkatan Pelayanan Pasar Tradisional Dan Peningkatan Ekspor-Import Daerah	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	1.03	1.03	100 %
1	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat Dan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	55.17	55.17	100 %
2	Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.12	84	104%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	61	102%

Sebagaimana pada tabel 3.4, maka rata-rata tingkat kemajuan pencapaian indikator sasaran pada tahun 2024 terhadap sasaran akhir RENSTRA (2026) adalah 102%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
I	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan Melalui Peningkatan Pelayanan Pasar Tradisional Dan	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	1.03	-	100 %

	<b>Peningkatan Ekspor- Impor Daerah</b>				
1	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat Dan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	55.17	-	100%
2	Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.12	-	104%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	-	102%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
I	<b>Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan Melalui Peningkatan Pelayanan Pasar Tradisional Dan Peningkatan Ekspor-Impor Daerah</b>	<b>Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha</b>	<b>1.03</b>	<b>1.03</b>	<b>100 %</b>	Berhasil	-
1	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat Dan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	55.17	55.17	100 %	Berhasil	-
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	87.12	104%	Berhasil	-
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61	62	102%	Berhasil	-

Dari tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa setiap Sasaran Dinas Perdagangan pada tahun 2024 berhasil dilaksanakan dengan baik dan tercapai semua target yang sudah ditetapkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.7**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat Dan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat Yang Memiliki Infrastruktur Yang Layak Fungsi	100 %	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE TERPENUHIN YA PELAYANAN PASAR	100	Menunjang
				Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana pasar yang dibangun	100	Menunjang
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	99	Menunjang
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	Menunjang
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Presentase Operasi Penertiban & Pelaksanaan Pemutahiran Data Pedagang Di Pasar Yang Dilaksanakan	94	Menunjang
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	94	Menunjang
	Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	104 %	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	100	Menunjang

					<b>PENTING</b>		
				<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyuluhan Dan Pemberdayaan Konsumen Yang Dilaksanakan</b>	100	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100	Menunjang
				<b>Pengendalian Harga, Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Data Harga Sembako , Barang Penting Di Pasaran</b>	100	Menunjang
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100	Menunjang
				Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM</b>	<b>PERSENTASE PENGEMBAN GAN EKSPOR YANG DILAKSANAK</b>	100	Menunjang

				NEGERI	AN		
				<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase Pengembangan Ekspor Yang Dilaksanakan</b>	100	Menunjang
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM Yang Memperoleh Fasilitas Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan Dan Jasa Akomodasi	100	Menunjang
				<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>PERSENTASE PELAYANAN TERA / TERA ULANG ALAT UTTP DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	99	Menunjang
				<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupatera, Tera Ulang, Dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang Dan Pengawasan Yang Dilaksanakan</b>	99	Menunjang
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	99	Menunjang
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE TERPENUHINYA LAYANAN KESEKRETARIATAN</b>	99	Menunjang
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Menunjang

					yang Disediakan		
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	99	Menunjang
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	100	Menunjang
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana</b>	99	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	100	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	Menunjang
				<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	100	Menunjang

				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil	100	Menunjang
				Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	Menunjang
				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	100	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	99	Menunjang
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang
				Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
				<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Yang Tersusun</b>	100	Menunjang

				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Yang Tersusun	100	Menunjang
--	--	--	--	--	--	-----	-----------

Dari tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa setiap Program, Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan menunjang kinerja Dinas Perdagangan pada tahun 2024.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>1.097.266.750</b>	<b>1.094.346.950</b>	<b>99</b>
1	Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.087.266.750	1.084.951.200	99
2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	10.000.000	9.395.750	94
<b>2</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>20.800.000</b>	<b>20.800.000</b>	<b>100</b>
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.000.000	2.000.000	100
2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	18.800.000	18.800.000	100
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>100</b>
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.200.000	3.200.000	100
<b>4</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>17.805.000</b>	<b>17.705.000</b>	<b>99</b>
1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Ulang, dan Pengawasan	17.805.000	17.705.000	99
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>32.834.454.253</b>	<b>32.623.342.647</b>	<b>99</b>

	KABUPATEN/KOTA			
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.476.173.738	11.431.210.394	99
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.214.500	61.681.054	99
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.451.262	212.798.000	99
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	100
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.912.461.003	20.748.501.699	99
6	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	166.153.750	166.151.500	100

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
I	Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan Melalui Peningkatan Pelayanan Pasar Tradisional Dan Peningkatan Ekspor-Impor Daerah	1.03	1.03	100	33.973.526.003	33.759.394.597	99.37	0.63 %
1	Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	55.17	55.17	100	1.097.266.750	1.094.346.950	99.73	0.27 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	84	87.12	104	32.876.259.253	32.665.047.647	99.36	0.64 %

Dari tabel 3.9 dapat dijelaskan untuk Tujuan/Sasaran Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan Melalui Peningkatan Pelayanan Pasar Tradisional Dan Peningkatan Ekspor-Import Daerah sebesar Rp33.973.526.003,- dengan realisasi sebesar Rp 33.759.394.597,- dengan semua program kegiatan terlaksana semua Dinas Perdagangan dapat mengefisiensi anggaran sebesar 0.63 %.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERDAGANGAN Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS PERDAGANGAN dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 DINAS PERDAGANGAN menetapkan sebanyak satu tujuan, dua sasaran dengan tiga indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan Melalui Peningkatan Pelayanan Pasar Tradisional Dan Peningkatan Ekspor-Impor Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori SangatTinggi)
- Sasaran Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang

Perdagangan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 104% (kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.973.526.003,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp33.759.394.597,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 99% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS PERDAGANGAN ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS PERDAGANGAN kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Bangkalan, 17 Februari 2025

**Pt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO  
DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANGKALAN**



**ACHMAD SIDDIK, S.A.P., MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700205 200312 1 004

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN**  
**DINAS PERDAGANGAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 15 Telp. (031) - 3095172 Bangkalan  
Email : disdag@bangkalankab.go.id

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKALAN**  
**NOMOR : 188.45/ / kpts / 433.121 /2024**  
**TENTANG**  
**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangkalan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan SAKIP di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan;
- b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Bangkalan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan;
- b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :

1. Rencana Strategis;
  2. Perjanjian Kinerja;
  3. Pengukuran Kinerja;
  4. Pengelolaan Data Kinerja;
  5. Pelaporan Kinerja; dan
  6. Reviu dan Evaluasi Kinerja;
- d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
- e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

**KETIGA** : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan  
pada tanggal : Januari 2024

Plt. **KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANGKALAN**



**BACHMAD SIDDIK, S.A.P., MM**  
Pembina TINGKAT I  
NIP. 19700205 200312 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR : 188.45/ /Kpts/433.121/2024  
TANGGAL : 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANGKALAN

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung jawab	Achmad Siddik, S.A.P., MM	Plt. Kepala Dinas Perdagangan
2.	Ketua	Dhenis Pribadi, SE	Kabid Pengelolaan Pasar
3.	Sekretaris	R. Aditya Perdana H, SE.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4.	Fasilitator :	Delly Septiana, SE, MM. Dhenis Pribadi, SE. Ashadi Firmansyah, ST.	Kabid Usaha Perdagangan Kabid Pengelolaan Pasar Plt. Kabid Metrologi
5.	Anggota :	Desy Silviana, SE, MM. Sukirno Harsoyo, SE, MM. Agus Sucipto, SE. Moch Rozeli, SE.  Sri Wahyuni R, SE, MM. Siti Fitriyah, SE, MM. Tini Suryanengrum, SE, MM. Adam Nurgusti A, SH, MM. Fathur Rijal, A.Md.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Pengawas Perdagangan Ahli Muda Analisis Kebijakan Ahli Muda Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Muda  Polisi Pamong Praja Ahli Muda Analisis Perdagangan Ahli Muda Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda Pengawas Perdagangan Ahli Muda Staff

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANGKALAN



ACHMAD SIDDIK, S.A.P., MM  
Pembina TINGKAT I  
NIP. 19700205 200312 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PERDAGANGAN

Jl. SoekarnoHatta No. 15 Telp/Fax. (031) 3095172 Fax (031) 3090378– 69116  
BANGKALAN

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR : 050/ /KIK/433.121/2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR : 050/ /433.121/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN  
TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan hasil pra evaluasi Tim KemenPAN RB, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2012;
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 57 tahun 2016.
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perdagangan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Pelaksana Kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada tanggal Januari 2024

Mengetahui,  
**Pt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANGKALAN**  
  
**ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700205 200312 1 004

Lampiran : Keputusan Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan  
Nomor : 188.45/ /KIK/433.121/2024  
Tanggal : Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERDAGANGAN 2024 – 2026**

TUJUAN : Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan melalui peningkatan pelayanan pasar tradisional dan peningkatan ekspor-impor daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	FORMULA	YG BER TANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan melalui peningkatan pelayanan pasar tradisional dan peningkatan ekspor-impor daerah	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha	Untuk mengetahui Pertumbuhan Pelaku Usaha Dalam Lingkup Dinas Perdagangan	$\sum \frac{\text{Kondisi tahun sebelumnya} - \text{Target Tahun ini}}{\text{Kondisi tahun Sebelumnya}} \times 100$	Kasubbag. Perencana dan Keuangan

**TARGET SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERDAGANGAN 2024 – 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			YG BER TANGGUNGJA WAB	KET
			2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase meningkatnya pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi  $\sum \frac{\text{Target Tahun ini}}{\text{Jumlah Pasar}} \times 100$	55,17	58,62	62,07	Kasubbag. Perencana dan Keuangan	
	Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan	Indek kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan daerah	84	85	86		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61	62	63		



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ACHMAD SIDDIK, SAP., MM.**  
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKALAN  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. H. ARIEF M. EDIE, M. Si**  
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKALAN

Selaku pihak atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

**Pihak pertama** pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua**, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
**Pj. BUPATI BANGKALAN**  
  
**Dr. H. ARIEF M. EDIE, M. Si**

Bangkalan, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
Plt. Kepala Dinas Perdagangan  
  
**ACHMAD SIDDIK, SAP., MM.**  
Pembina TK. I  
NIP. 19700205 200312 1 004

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Meningkatnya layanan pasar rakyat dan daya saing sektor perdagangan	Persentase pasar rakyat yang memiliki infrastruktur yang layak fungsi	6.9 %
		Nilai SKM terhadap layanan pasar	84

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 32.357.306.700	APBD
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp. 1.097.266.750	APBD
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp. 19.000.000	APBD
4	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGER	Rp. 5.000.000	APBD
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp. 26.000.000	APBD





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. ARIEF M. EDIE, M. Si  
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKALAN

Selaku pihak atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

**Pihak pertama** pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua**, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Bangkalan, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
Plt. Kepala Dinas Perdagangan  
  
ACHMAD SIDDIK, S.AP., MM.  
Pembina FK. I  
NIP. 19700205-200312 1 004

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Kesekretariatan	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 33.016.197.597,-	APBD



Bangkalan, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
**PH. Kepala Dinas Perdagangan**  
**ACHMAD SIDDIK, SAP., MM.**  
Pembina TK. I  
NIP. 19790205-200312 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. ADITYA PERDANA H, SE  
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan  
**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Selaku pihak atasan pihak pertama, **selanjutnya disebut pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua**, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas Perdagangan

ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700207 200312 1 004

Bangkalan, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

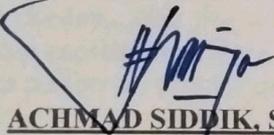
R. ADITYA PERDANA H, SE  
Penata Muda Tk. I  
NIP. 19870321 201503 1 001

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dokumen
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 500.000,-
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 500.000,-
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 500.000,-

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	500.000,-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	500.000,-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	500.000,-
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	20.310.598.450,-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	500.000,-

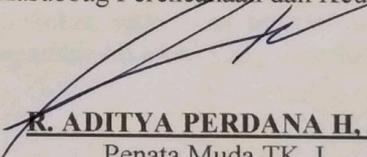
Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas Perdagangan

  
**ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19700207 200312 1 004

Bangkalan, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

  
**R. ADITYA PERDANA H, SE**

Penata Muda TK. I

NIP. 19870321 201503 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESY SILVIANA, SE  
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Selaku pihak atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**Pihak Pertama** pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua**, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas Perdagangan

**ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19640627 198603 1 006

Bangkalan, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

**DESY SILVIANA, SE, MM**

Penata Tk. I

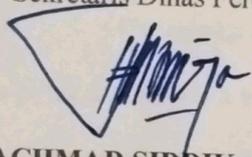
NIP. 19821203 200903 2 002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit
	Terpenuhinya Penyediaan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Unit
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Jenis
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Jenis
	Terpenuhinya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 60.200.000,-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 10.000.000,-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 3.150.000,-
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 1.869.500,-

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 542.400.000,-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 11.259.435.000,-

Pihak Kedua,  
Sekretaris Dinas Perdagangan

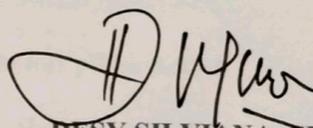


**ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19640627 198603 1 006

Bangkalan, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian



**DESY SILVIANA, SE, MM**

Penata Tk. I

NIP. 19821203 200903 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELLY SEPTIANA, SE  
Jabatan : Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : **ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM**  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Selaku pihak atasan pihak pertama, **selanjutnya disebut pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua**, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Plt. Kepala Dinas Perdagangan

**ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19700207 200312 1 004

Bangkalan, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Usaha Perdagangan

**DELLY SEPTIANA, SE**

Penata Tk. I

NIP. 19760910 200312 2 005

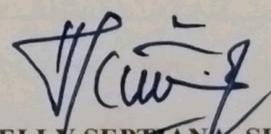
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksanakannya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<b>Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>100 %</b>
		Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3 Sub Kegiatan
	Terlaksanakannya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang diadakan	<b>Persentase program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>
		persentase pelaksanaan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1 Sub Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Rp. 15.000.000,-	APBD
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp. 15.000.000,-	APBD
2	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Rp. 5.000.000,-	APBD
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp. 5.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,  
Plt. Kepala Dinas Perdagangan

  
**ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700207 200312 1 004

Bangkalan, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Usaha Perdagangan

  
**DELLY SEPTIANA, SE**  
Penata Tk. I  
NIP. 19760910 200312 2 005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASHADI FIRMANSYAH, ST**  
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen

### Selanjutnya disebut pihak pertama

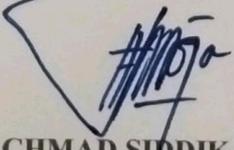
Nama : **ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM**  
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Selaku pihak atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

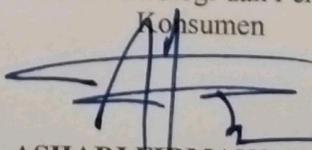
**Pihak pertama** pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua**, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Perdagangan

  
**ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700207 200312 1 004

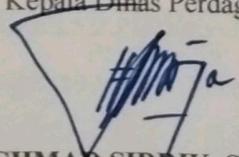
Bangkalan, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
Plt. Kabid Metrologi dan Perlindungan  
Konsumen

  
**ASHADI FIRMANSYAH, ST**  
Penata Tk. I  
NIP. 19830114 201001 1 022

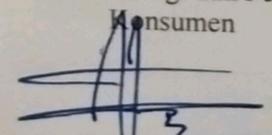
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<b>Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>100 %</b>
		Persentase penyuluhan dan pemberdayaan konsumen yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan
		Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1 Sub Kegiatan
	Meningkatnya pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen	<b>Persentase pelayanan tera / tera ulang alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen</b>	<b>100 %</b>
		Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Rp. 4.000.000,-	APBD
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp. 2.000.000,-	APBD
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.000.000,-	APBD
2	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Rp. 26.000.000,-	APBD
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp. 26.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas Perdagangan

  
**ACHMAD SIDDIK, S.Ap. MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700207 200312 1 004

Bangkalan, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
Plt. Kabid Metrologi dan Perlindungan  
Konsumen

  
**ASHADI FIRMANSYAH, ST**  
Penata Tk. I  
NIP. 19830114 201001 1 022



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen, pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DHENIS PRIBADI, SE  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : **ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM**  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangkalan

Selaku pihak atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

**Pihak pertama** pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua**, akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Plt. Kepala Dinas Perdagangan

**ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19700207 200312 1 004

Bangkalan, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

**DHENIS PRIBADI, SE**

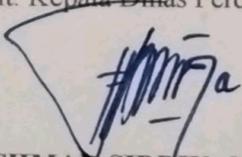
Penata Tk. I

NIP. 19820601 200312 1 003

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Pelayanan pasar	Persentase terpenuhinya Pelayanan pasar	100 %
		Presentase Sarana kebersihan dan pemeliharaan pasar yang dilaksanakan	2 Sub Kegiatan
		Presentase operasi penertiban & pelaksanaan pemutahiran data pedagang di pasar yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan
	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Perdagangan)	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan (Dinas Perdagangan)	100 %
		Presentase sarana prasarana pengelolaan retribusi pasar yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Rp. 1.074.010.800,-	APBD
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.064.010.800,-	APBD
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp. 10.000.000,-	APBD
2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rp. 166.153.750,-	APBD
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 166.153.750,-	APBD

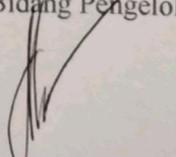
Pihak Kedua,  
Plt. Kepala Dinas Perdagangan

  
**ACHMAD SIDDIK, S.Ap, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19700207 200312 1 004

Bangkalan, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar

  
**DHENIS PRIBADI, SE**

Penata Tk. I

NIP. 19820601 200312 1 003